

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 RENCANA STRATEGIS

Perencanaan jangka menengah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat tertuang dalam Renstra Tahun 2013-2018 yang didalamnya terdapat visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun.

#### 2.1.1. Visi dan Misi

Dalam upaya mendukung pencapaian visi pemerintah Provinsi Jawa Barat dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, maka Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat menetapkan visi yaitu: ***“Terwujudnya Sistem Pergerakan yang Handal dan Efisien”***

Visi tersebut dijabarkan dalam 2 (dua) kata kunci (*key words*) yang perlu dijelaskan agar terjadi kesamaan persepsi dalam pemahaman visi tersebut.

- a. **Pertama:** Sistem pergerakan yang **handal** adalah suatu keadaan dimana kebutuhan pergerakan, baik pergerakan orang maupun pergerakan barang dapat terfasilitasi dengan aman, selamat, nyaman, terjangkau, dan efektif, menjangkau seluruh daerah di Jawa Barat serta mendukung pembangunan Provinsi Jawa Barat menuju Jawa Barat maju dan sejahtera untuk semua
- b. **Kedua:** Sistem pergerakan yang **efisien** adalah suatu keadaan yang kebutuhan pergerakan, baik pergerakan orang maupun pergerakan barang dapat terfasilitasi secara efisien dan dengan harga yang terjangkau serta ramah lingkungan dan dilayani oleh SDM yang profesional serta dapat mendukung pembangunan Jawa Barat menuju Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk semua.

Dalam upaya pencapaian visi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat tersebut, Dinas Perhubungan menetapkan 2 (dua) **misi** yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan transportasi di Jawa Barat ;
2. Meningkatkan jalan yang berkeselamatan di Jawa Barat.

#### 2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan keseluruhan yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi;

- 2. Meningkatnya ketertiban lalu lintas angkutan jalan;
- 3. Meningkatkan penyediaan prasarana transportasi di Jawa Barat ;
- 4. Meningkatkan ketersediaan kelengkapan jalan.

Tujuan yang ingin dicapai tersebut merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dari 4 (empat) tujuan tersebut, tujuan nomor 1 adalah tujuan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja dan 3 (tiga) tujuan yang terkait langsung dengan pencapaian indikator kepala Dinas yaitu nomor 2,3 dan 4. Adapun matrik tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

**TABEL 2.1**  
**MATRIK TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA**  
**DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT**  
**TAHUN 2013 – 2018**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi	Meningkatnya kualitas pelayanan moda transportasi umum	Prosentase keikutsertaan kabupaten/kota dalam WTN
			Prosentase kepemilikan armada angkutan umum (AKDP) perseorangan menjadi badan hukum
			Prosentase ketersediaan AKDP di Jawa Barat
2	Meningkatnya ketertiban lalu lintas angkutan jalan	Meningkatnya ketertiban lalu lintas angkutan umum	Prosentase kendaraan tidak melanggar muatan lebih di Jembatan Timbang
			Prosentase kendaraan umum laik Jalan di Jawa barat
3	Meningkatkan penyediaan prasarana transportasi di Jawa Barat	Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi	Prosentase ketersediaan dermaga/pelabuhan ASDP
			Prosentase Ketersediaan prasarana jalur kereta api aktif di Jawa Barat
			Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (pembangunan BIJB Kertajati dan pengembangan Bandara Nusawiru)
4	Meningkatnya ketersediaan perlengkapan jalan	Meningkatkan ketersediaan kelengkapan jalan di ruas jalan Provinsi	Prosentase ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, Guardrail, PJU) di Jalan Provinsi

Sumber : Renstra (2013-2018), Renja, RKT dan PK Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

**2.1.3 Strategi dan Kebijakan**

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam lima tahun mendatang yang diselaraskan dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Menurut RPJMD Tahun 2013-2018, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat perlu melaksanakan strategi yaitu Mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang dan barang serta pengembangan sistem transportasi publik regional yang nyaman dengan

menerapkan kebijakan Peningkatan sarana dan prasarana dasar perhubungan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pengangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat merencanakan strategi dan kebijakan untuk lima tahun kedepan dengan uraian sebagai berikut:

**TABEL 2.2**  
**STRATEGI DAN KEBIJAKAN**  
**DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT**

No	Strategi	Kebijakan	
1	Peningkatan pelayanan moda transportasi umum	1.	Pendidikan kemasyarakatan produktif melalui wahana tata nugraha (WTN) dan pembinaan pengemudi kendaraan umum
		2.	Pendidikan kemasyarakatan produktif melalui sosialisasi bidang transportasi
		3.	Evaluasi pelayanan jaringan dan angkutan kota dalam provinsi (AKDP) di Jawa Barat
2	Peningkatan ketertiban lalu lintas angkutan umum	1.	Pengawasan dan pengendalian bidang perhubungan
		2.	Koordinasi teknis bidang perhubungan
3	Peningkatan ketersediaan prasarana transportasi	1.	Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan dan peningkatan prasarana transportasi
4	Meningkatkan ketersediaan kelengkapan jalan di ruas jalan Provinsi	1.	Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas

Sumber : Renstra (2013-2018), Renja, RKT dan PK Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

#### 2.1.4 Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Sesuai strategi dan kebijakan tersebut di atas, untuk mementapkan tujuan dan sasaran visi dan misi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 perlu di dukung dengan program yang dirumuskan. Program dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan ada sebanyak 14 (empat belas) program sebagai berikut :

**TABEL 2.3**  
**PROGRAM DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

No	Kode Program	Program	Keterangan
1	29	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bidang Perencanaan Pembangunan

No	Kode Program	Program	Keterangan
2	49	Program PembangunannPrasarana dan Fasilitas Perhubungan	Bidang Perhubungan
3	50	Program Rehabilitas Dan Pemel Prasarana Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	Bidang Perhubungan
4	51	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Bidang Perhubungan
5	52.	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	Bidang Perhubungan
6	53	Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor	Bidang Perhubungan
7	57.	Program Pemantapan Otonomi Daerah Dan Sistem Administrasi Daerah	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian
8	59.	Program Pembinaan, Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Aparatur	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian
9	60	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian
10	61	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian
11	62	Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian
12	66	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian
13	75	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Bidang Statistik
14	14	Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Bidang Perencanaan dan Pembangunan

Sumber : Renstra (2013-2018), Renja, RKT dan PK Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

## 2.2 PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2016

Tahun 2016 merupakan tahapan ke-3 pada rangkaian pembangunan jangka menengah tahun 2013-2018. Prioritas dan sasaran pembangunan Jawa Barat tahun 2016 ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Perencanan pembangunan berdasarkan kerangka kebijakan pembangunan jangka menengah 2013-2018 yang telah ditetapkan, maka kebijakan pembangunan tahunan daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat, harus tetap memperhatikan konsistensi dan sinkronisasi terhadap kerangka kebijakan pembangunan jangka menengah 2013-2018. Reposisi pembangunan masih dilaksanakan pada tahun ini dengan harapan mendudukan kembali peran Pemerintah Provinsi melalui upaya penyelesaian permasalahan strategis Provinsi yang sifatnya lintas Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan standar pelayanan

minimal (SPM) Provinsi, serta meningkatkan upaya pencapaian pelaksanaan pembangunan sehingga memberikan hasil yang berkualitas. Hasil pembangunan Jawa Barat yang berkualitas ini untuk kemajuan masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan. Dan Tema pembangunan Jawa Barat Tahun 2016 adalah: **“Satu Perencanaan Jabar untuk Peningkatan Daya Saing , Kemandirian dan Kesiapan dalam Persaingan Global”**. Dengan tujuan pembangunan Jawa Barat tahun 2016 adalah optimalisasi pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah dan berbagai lapisan masyarakat sehingga menghasilkan pembangunan yang berkualitas untuk kemajuan masyarakat Jawa Barat.

Isu strategis berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 antara lain sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas kompetensi aparatur (sumber daya manusia/SDM) Perhubungan yang andal dan berkualitas di bidang transportasi/perhubungan;
2. Belum berkembangnya penyediaan sistem angkutan umum massal (BRT, Kereta Api dan lain-lain) yang terpadu dan berkelanjutan, baik yang berbasis jalan maupun non jalan;
3. Rendahnya tingkat keselamatan lalu lintas jalan;
4. Rendahnya kapasitas ruas jalan dan tingginya hambatan samping di perkotaan;
5. Belum termanfaatkannya IPTEK pada penyelenggaraan transportasi darat;
6. Belum terwujudnya pembangunan pelabuhan laut Cilamaya di Jawa Barat untuk mendukung pergerakan barang dan jasa;
7. Belum terwujudnya Pengembangan dan pembangunan prasarana dan fasilitas pelabuhan laut pengumpan regional;
8. Belum optimalnya Pengembangan dan pembangunan prasarana dan fasilitas angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP);
9. Belum terwujudnya fasilitas prasarana transportasi udara di Jawa Barat;
10. Belum terwujudnya peningkatan pengendalian dan penataan sistem transportasi.

Berdasarkan sasaran yang direncanakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat memiliki Indikator Kinerja dengan target tahunan, adapun indikator tersebut dengan target pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

**TABEL 2.4**  
**INDIKATOR KINERJA DENGAN TARGET TAHUN 2016**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2016 (%)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan moda transportasi umum	Prosentase keikutsertaan kabupaten/kota dalam WTN	55,56
		Prosentase kepemilikan armada angkutan umum {AKDP} perseorangan menjadi badan hukum	50,11
		Prosentase ketersediaan AKDP di Jawa Barat	94,00
2.	Meningkatnya ketertiban lalu lintas angkutan umum	Prosentase kendaraan tidak melanggar muatan lebih di Jembatan Timbang	79,00
		Prosentase kendaraan umum laik Jalan di Jawa barat	100,00

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2016 (%)
3.	Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi	Prosentase ketersediaan dermaga/pelabuhan ASDP	66,67
		Prosentase Ketersediaan prasarana jalur kereta api aktif di Jawa Barat	74,29
		Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (pembangunan BIJB Kertajati dan pengembangan Bandara Nusawiru)	45,64
4.	Meningkatkan ketersediaan kelengkapan jalan di ruas jalan Provinsi	Prosentase ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, Guardrail, PJU) di Jalan Provinsi	21,00

Sumber : Renstra (2013-2018), Renja, RKT dan PK Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Renformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan, Kepala OPD diwajibkan untuk menyusun Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2016 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016.

Perjanjian Kinerja ini dibuat sebagai alat kendali pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 dalam mencapai Sasaran Strategik Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan Gubernur Jawa Barat adalah sebagai berikut :

TABEL 2.5  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016  
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Moda Transportasi Umum	Prosentase keikutsertaan kabupaten/kota daplam Wahana Tata Nugraha (WTN)	55,56
		Prosentase kepemilikan armada Angkutan Umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) perseorangan menjadi badan hukum	50,12
		Prosentase ketersediaan AKDP di Jawa Barat	94,00
2.	Meningkatnya Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Umum	Prosentase kendaraan tidak melanggar muatan lebih di Jembatan Timbang	79,00
		Prosentase kendaraan umum laik Jalan di Jawa Barat	100,00
3.	Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Transportasi	Prosentase ketersediaan dermaga/pelabuhan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP)	66,67

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Prosentase Ketersediaan prasarana jalur kereta api aktif di Jawa Barat	74,29
		Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dan pengembangan Bandara Nusawiru)	45,64
4.	Meningkatkan ketersediaan kelengkapan jalan di ruas jalan Provinsi	Prosentase ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, Guardrail, Penerangan Jalan Umum/PJU) di Jalan Provinsi	21,00

Sumber : PK Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Program yang terdapat dalam lampiran perjanjian kinerja Tahun 2016 tersebut adalah sebagai berikut:

**TABEL 2.6**  
**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2016**

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rp. 85,150,000.00	Sumber Pembiayaan dari APBD Jawa Barat Tahun 2015
2.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp. 3,244,325,000.00	Sumber Pembiayaan dari APBD Jawa Barat Tahun 2015
3.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp. 3,937,745,000.00	Sumber Pembiayaan dari APBD Jawa Barat Tahun 2015
4.	Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor	Rp. 432,835,000.00	Sumber Pembiayaan dari APBD Jawa Barat Tahun 2015
5.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 12,797,147,084.00	Sumber Pembiayaan dari APBD Jawa Barat Tahun 2015
6.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Rp. 44,534,967,200.00	Sumber Pembiayaan dari APBD Jawa Barat Tahun 2015

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 antara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dengan Gubernur Jawa Barat sebagaimana terlampir. Dan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut dilanjutkan dengan Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat (Eselon II) dengan Eselon III dan dilanjutkan Perjanjian Kinerja antara Eselon III dengan Eselon IV.